



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dana Bos SMP Negeri di Kota Yogyakarta

Febrianti Puspita Sari^{1*}, Jumadi², Juhana³

Universitas Terbuka Yogyakarta^{1*}
Universitas Widy Mataram²
Universitas Terbuka Jakarta³

Abstrak

Jumlah realisasi dana BOS SMP Negeri di Kota Yogyakarta masih dibawah 100% pada tahun 2018, 2019, dan 2020, ini menggambarkan bahwa penyerapan anggaran kurang maksimal. Penyerapan anggaran kurang maksimal dapat menghambat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor penyerapan anggaran dana BOS SMP Negeri di Kota Yogyakarta. Pengujian hipotesis diuji menggunakan analisis regresi. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah Kepala, Wakil Kepala, Bendahara, Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang bekerja pada SMP Negeri di Lingkungan DINDIKPORA Kota Yogyakarta yang berjumlah 16 SMP. Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu olah data IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian ini mengungkapkan faktor perencanaan, pelaksanaan, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran dana BOS SMP Negeri di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, Perencanaan, Pelaksanaan, Regulasi

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah baik pusat ataupun daerah sering diukur dari penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan karena terdapat asumsi bahwa penyerapan anggaran yang baik akan menghasilkan keluaran yang optimal. Seperti yang diamanatkan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa alat akuntabilitas, manajemen maupun kebijakan ekonomi merupakan definisi dari anggaran. Fungsi anggaran sebagai kebijakan ekonomi yaitu untuk merealisasikan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian juga pemerataan pendapatan sebagaicara untuk memperoleh tujuan negara.

Ketika penyerapan anggaran maksimal, maka kinerja sebuah instansi dalam pemerintahan dianggap baik. Tolak ukur tersebut mendorong instansi untuk berlomba-lomba menghabiskan anggaran agar target yang diharapkan tercapai. Halim (2014:84) berpendapat bahwa penyerapan anggaran adalah sebuah capaian dari penaksiran tertentu yang hendak diwujudkan dalam suatu periode, diproyeksikan pada masa tertentu antara realisasi dari anggaran. Melesetnya perkiraan penyerapan anggaran benar-benar berdampak pada kehilangan manfaat belanja, hal ini dikarenakan dana yang didistribusikan pada kenyataannya tidak seluruhnya bisa digunakan sehingga memunculkan adanya dana yang menganggur (idle money).

Penyerapan anggaran sebagai dasar tolak ukur kinerja pemerintah memiliki beberapa permasalahan. Berdasarkan Solihin (2013:41) persoalan baik secara administrasi ataupun teknis yaitu berupa lambatnya proses tender, terlambatnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, keengganan karyawan untuk dipilih sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta sedikitnya karyawan yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang ataupun jasa. Hal tersebut memberikan dampak terhadap penyerapan anggaran yang tidak optimal.

Pengelolaan keuangan di daerah diharapkan mempunyai kapasitas lebih besar dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan anggarannya bagi sektor-sektor prioritas pembangunan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat di daerah. Begitu juga dengan instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DINDIKPORA) Kota Yogyakarta yang



menginginkan tercipta efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Harapannya dengan penyerapan yang efisien dan efektif, progam pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang mengatur mengenai penerapandana BOS. Prinsip efektivitas pada penerapandana BOS diupayakan untuk memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna supaya memperoleh sasaran pendidikan di Sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi yaitu upaya penggunaan dana BOS dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan mutu hasil belajar walaupun dengan biaya yang minimal.

Penyerapan anggaran menjadi salah satu penentu kesuksesan pemerintah dalam melaksanakan fungsi stabilisasi, alokasi, serta distribusi. Pada dasarnya penyerapan anggaran dapat diukur secara sederhana dengan membandingkan anggaran dan realisasi. Penyerapan anggaran apabila optimal direalisasikan sesuai anggaran dapat mendorong terejawantah perekonomian yang baik. Namun demikian, apabila terjadi keterlambatan penyerapan anggaran maka secara ekonomi dapat mengakibatkan kerugian negara

Keberhasilan pemerintah dapat diukur dari penyerapan anggaran dengan indikator evaluasi kinerja untuk menggerakkan roda perekonomian. Rai (2010:49) menyatakan bahwa penyerapan anggaran adalah sebuah parameter hasil kerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian serta merupakan sebuah indikator penilaian hasil kerja yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Penyerapan anggaran yang maksimal bisa menopang roda perekonomian sebuah daerah.

Pada tahap awal penyerapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, merupakan prosedur inti pada pengelolaan anggaran. Perencanaan menjadi hal yang penting karena perencanaan adalah rujukan bagi penganggaran pada proses pembuatan rencana pendapatan, belanja, serta pendanaan untuk periode tertentu. Sementara itu, perencanaan menurut Herlambang (2013:50) yaitu pemilihan serta penghubung kejadian dan pemrosesan serta pembuatan estimasi maupun asumsi untuk waktu yang akan datang dengan cara merefleksikan serta memformulasikan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan guna memperoleh hasil yang diinginkan. Perencanaan anggaran memiliki peran dalam memberi arahan untuk penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan Sasongko & Parulian (2015:3). Berdasarkan sejumlah definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa perencanaan anggaran adalah aktivitas keuangan yang memuat perancangan belanja yang diajukan pada satu periode serta sumber pendapatan yang diajukan untuk mendanai belanja itu.

Pelaksanaan anggaran adalah hal yang terpenting pada proses realisasi progam dan aktivitas pemerintah yang disusun dalam dokumen anggaran. Namun terdapat beberapa kendala yang dialami instansi pada saat pelaksanaan anggaran. Kendala yang dialami oleh instansi diantaranya adalah masa penyusunan dan penelaahana anggaran yang terlalu singkat, jadwal pengajuan pencairan anggaran tidak seuai, terdapat beberapa kegiatan dari luar instansi yang mendadak, dan perbedaan estimasi rincian belanja pada anggaran dan realisasi.

Upaya pemerintah telah dilaksanakan untuk mendorong terpacunya realisasi anggaran antara lain dengan reformasi birokrasi, penataan pegawai, hinggapemberian tunjangan penghasilan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai utamanya pada proses realisasi anggaran. Namun usaha pemerintah untuk mengatasi realisasi yang kurang maksimal belum cukup membuahkan hasil. Sudarwati et al., (2017) menyebutkan pelaksanaan anggaran turut sebagai faktor penghambat realisasi anggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Gagola et al., (2017) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran berimbas positif, signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat memahami proses akuntansi dengan tepat. Apabila SDM tidak dapat memahami serta mengimplementasikan proses akuntansi dengan tepat, maka berdampak terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang disusun serta ketidakselarasan laporan dengan aturan yang diberlakukan pemerintah. Penelitian (Hasni & Basukianto, 2016) menemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran berupa sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyerapan anggaran terlambat dikarenakan kualitas sumber daya alam yang kurang baik.

Administrasi yang lengkap menjadi syarat utama dalam kerjasama pengadaan barang dan jasa. Faktor pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan dalam upaya memperoleh barang dan jasa oleh instansi yang urutannya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga terselesainya semua aktivitas untuk mendapatkan barang dan jasa (Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1). Widianingrum et al., (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa menyertai faktor yang

memengaruhi penyerapan anggaran. Variabel dominan yang memberikan pengaruh adalah permasalahan terkait ketidaksesuaian spesifikasi pada dokumen kontrak.

Regulasi pada dasarnya digunakan oleh sebuah organisasi dengan tujuan mewujudkan kebijakan sebagai upaya menghadapi isu dan permasalahan yang muncul. Namun demikian, karena jumlah peraturan yang beragam dan berubah secara cepat menyesuaikan kondisi sementara anggaran telah disusun, pada akhirnya menyebabkan pelaksanaan anggaran terkendala. Hal ini dapat mengakibatkan penyerapan anggaran kurang maksimal. Penyerapan anggaran dipengaruhi oleh regulasi berdasarkan penelitian Widianingrum et al., (2017). Keluaran dari penelitian ini memberikan simpulan agar anggaran kas dalam DPA dilaksanakan lebih taat dan tertib, perlu adanya peraturan kepala daerah yang mengatur sanksi dan penghargaan untuk instansi atas pengelolaan keuangan daerah. Selain hal itu, dipandang perlu menyusun suatu indikator kinerja untuk pedoman pemberian sanksi dan penghargaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran jamak diteliti, namun variabel yang digunakan beragam dengan hasil yang berbeda. Penelitian oleh Zulaikah & Burhany (2019) menggambarkan bahwa faktor perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif pada penumpukan penyerapan anggaran. Sedangkan Salamah (2018) menyebutkan faktor yang mempengaruhi adalah perencanaan, regulasi dan sumber daya alam. Rerung (2017) mengungkapkan bahwa komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, dan pelaksanaan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan sumber daya manusia tidak berpengaruh. Rozai & Subagiyo (2015) memberikan kesimpulan bahwa perencanaan dan revisi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian Trisna et al., (2020) adalah perencanaan berpengaruh positif dan signifikan dan sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Mutmainna & Iqbal (2017) menjabarkan variabel pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi SDM, dan dokumen pengadaan memiliki pengaruh signifikan. Pencatatan administrasi tidak berpengaruh signifikan. Nugroho & S. Alfari (2017) menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, koordinasi berpengaruh signifikan. Pengadaan barang dan jasa dan faktor SDM tidak berpengaruh signifikan.

Syakhrial (2017) menyatakan bahwa perencanaan, administrasi, proses verifikasi mempunyai pengaruh signifikan. Sedangkan Oktaliza et al., (2020) menyatakan bahwa kualitas SDM, Regulasi, perencanaan, komitmen manajemen mempunyai pengaruh positif. Sementara Yanurizza (2019) perencanaan, pencatatan administrasi, SDM, komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Lingkungan birokrasi tidak berpengaruh. Jumriani (2018) memaparkan dalam penelitiannya bahwa faktor (1) dokumen perencanaan, (2) pencatatan administrasi, (3) sumber daya manusia, dan (4) uang persediaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasni & Basukianto (2016) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran. Penelitian oleh Kirnanda (2016) menghasilkan kesimpulan perencanaan, administrasi, SDM, dokumen pengadaan, serta pengajuan ganti uang persediaan dengan simultan memberikan pengaruh positif signifikan pada penyerapan anggaran. Sedangkan Nuri (2017) pada penelitiannya menyebutkan bahwa penyerapan anggaran secara simultan dipengaruhi oleh perencanaan, sumber daya manusia, dokumen pengadaan, ganti uang persediaan, dan perubahan anggaran dengan signifikan.

Pengelolaan keuangan di daerah diharapkan mempunyai kapasitas lebih besar dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan anggarannya bagi sektor-sektor prioritas pembangunan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat di daerah. Begitu juga dengan instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DINDIKPORA) Kota Yogyakarta yang menginginkan tercipta efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan dana BOS.

Tabel 1. Perbandingan SILPA Dana BOS Reguler DINDIKPORA Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2020

Sekolah	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	SILPA	SILPA	SILPA
SMP N 1	278.651.532	234.657.161	474.175.083
SMP N 2			



	135.723.320	178.469.457	278.992.441
SMP N 3	166.666.637	93.669.326	101.099.653
SMP N 4	71.875.570	457.933.011	251.431.967
SMP N 5	150.648.669	53.755.930	245.201.218
SMP N 6	290.984.231	338.941.504	134.947.243
SMP N 7	67.193.920	81.611.755	32.711.600
SMP N 8	141.726.326	915.132.700	127.213.984
SMP N 9	260.604.124	235.456.436	215.147.359
SMP N 10	133.777.514	451.604.567	175.048.806
SMP N 11	154.955.179	203.176.623	90.036.486
SMP N 12	247.848.034	152.662.522	8.487.052
SMP N 13	106.107.580	126.153.119	140.441.041
SMP N 14	34.606.138	345.289.419	33.580.826
SMP N 15	198.141.513	364.232.323	498.110.991
SMP N 16	270.213.395	245.827.034	341.971.337
Jumlah	2.709.723.682	4.478.572.887	3.148.597.087

Sumber : data primer diolah peneliti

Apabila melihat jumlah silpa total pada tahun 2018 jumlah silpa dana BOS SMP Negeri Kota Yogyakarta adalah Rp 2.709.723.682,- atau realisasi sebesar 79% dari anggaran sementara itu silpa total pada tahun 2019 jumlah silpa dana BOS SMP Negeri di Kota Yogyakarta adalah Rp 4.478.572.887,- atau realisasi sebesar 70% dari anggaran. Kemudian jumlah silpa total pada tahun 2020 jumlah silpa dana BOS SMP Negeri di Kota Yogyakarta adalah Rp 3.148.597.087,- atau realisasi sebesar 80% dari anggaran.

Selanjutnya, berkaitan dengan jumlah realisasi yang masih dibawah 100% pada tahun 2018, 2019, dan 2020, menggambarkan penyerapan anggaran dana BOS SMP Negeri di Kota Yogyakarta kurang maksimal penyerapannya. Penyerapan anggaran kurang maksimal dapat menghasilkan output yang kurang maksimal pula dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis sejumlah faktor yang memberikan pengaruh terhadap penyerapan anggaran karena pada rentang tahun tersebut realisasi penyerapan anggaran kurang dari 100%. Berdasarkan permasalahan realisasi dana BOS SMP Negeri di Kota Yogyakarta yang masih dibawah 100% dan penelitian terdahulu, maka hipotesis terhadap penelitian ini adalah Perencanaan, pelaksanaan, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap SMP Negeri di lingkungan DINDIKPORA Kota Yogyakarta. Populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Kepala, Wakil Kepala, Bendahara, Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang bekerja pada di SMP Negeri di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui kuesionerGoogle Form. Instrumen penelitian yang diterapkan adalah kuisisioner skala likert 4 skala modifikasi. Langkah selanjutnya setelah data terkumpul adalah melaksanakan uji validitas dan reabilitas. Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu olah data IBM SPSS versi 26, sedangkan untuk menjawab rumusan permasalahan, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif.

Pengujian dilakukan untuk menguji pengaruh lima variabel bebas perencanaan (X1) pelaksanaan (X2) kompetensi SDM (X3) pengadaan barang dan jasa (X4) dan regulasi (X5) terhadap variabel terikat penyerapan anggaran dana BOS (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di 16 SMP Negeri di lingkungan DINDIKPORA Kota Yogyakarta berkedudukan selaku ibukota Provinsi DIY. Kota Yogyakarta memiliki enam puluh lima SMP yang terdiri dari 16 SMP Negeri serta 49 SMP swasta. Enam puluh lima sekolah tersebut, dibawah pengawasan pengawasan DINDIKPORA Kota Yogyakarta yang merupakan penyelenggara pemerintahan khususnya bidang Pendidikan. Jumlah responden yang menjawab adalah 98 orang yang terdiri dari 39 pria dan 59 wanita. Tingkat pendidikan mayoritas responden berasal dari sarjana yang berpendidikan non akuntansi. Berdasarkan hasil olah jawaban responden analisis data yang diperoleh adalah sebagai berikut:.

Analisis Deskriptif

Perhitungan skor rata-rata setiap variable dari hasil olah kuisioner dapat digambarkan seperti berikut:

Table 2. Rata-rata Variabel

Variabel	Rata-Rata	Kriteria
Penyerapan Anggaran (Y)	3,62	Sangat Tinggi
Perencanaan (X1)	2,79	Baik
Pelaksanaan (X2)	2,79	Baik
Kompetensi SDM (X3)	3,45	Sangat Baik
Pengadaan Barang dan Jasa (X4)	2,81	Baik
Regulasi (X5)	3.62	Sangat Baik

Sumber : data primer diolah peneliti

Berdasarkan tabel 2 diatas bisa diamati persepsi responden atas variabel penelitian yang dijalankan di unit kerja responden diperoleh data bahwa rata-rata penyerapan anggaran adalah 3,62. Hal ini menunjukkan mayoritas responden memberikan penafsiran sangat tinggi terhadap butir pertanyaan pada penyerapan anggaran. Sedangkan rata-rata perencanaan adalah 2,79. Hal ini menunjukkan mayoritas responden memberikan penafsiran baik terhadap butir pertanyaan pada perencanaan. Variabel pelaksanaan memiliki rata-rata 2,79. Hal ini menunjukkan mayoritas responden memberikan penafsiran baik terhadap butir pertanyaan pada pelaksanaan. Rata-rata kompetensi SDM adalah 3,45. Hal ini menunjukkan mayoritas responden memberikan penafsiran sangat baik terhadap butir pertanyaan pada kompetensi SDM. Pada variabel pengadaan barang dan jasa rata-ratanya adalah 2,81. Hal ini menunjukkan mayoritas responden memberikan penafsiran baik terhadap butir pertanyaan pada pengadaan barang dan jasa. Kemudian pada variabel regulasi rata-ratanya adalah 3,62. Hal ini menunjukkan mayoritas responden memberikan penafsiran sangat baik terhadap butir pertanyaan pada regulasi.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memberikan penafsiran jawaban yang sangat tinggi pada butir penyerapan anggaran, baik pada butir pertanyaan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, dan penafsiran sangat baik pada butir pertanyaan kompetensi SDM dan regulasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji validitas memanfaatkan software SPSS dengan cara membandingkan angka korelasi dan angka kritik. Apabila angka korelasi didapatkan lebih tinggi daripada angka kritik berarti instrumen itu dinyatakan valid. Berlandaskan hasil pengujian validitas bisa ditarik kesimpulan yakni keseluruhan item pernyataan untuk mengukur tiap-tiap variabel penelitian dikatakan valid. Hal tersebut bisa diketahui bahwa keseluruhan angka korelasi lebih besar angka kritik, yang mana nilai angka korelasi masing-masing indikator berada pada kisaran 0,271 – 0,77 dan angka kritik untuk sampel sejumlah 98 adalah 0,196.

Pengujian reliabilitas data yakni dengan mengamati nilai angka korelasi. Bilamana nilai angka korelasi > angka kritik, maka kuisioner penelitian tersebut dikatakan reliabel. Berdasarkan pengujian nilai Cronbach Alpha dari tiap-tiap variabel penelitian mempunyai nilai lebih besar dari 0,7 yaitu berada pada kisaran 0,862 - 0,875 untuk masing-masing indikator. Dengan begitu bisa ditarik kesimpulan yakni kuisioner yang dipakai dalam penelitian reliabel ataupun andal.

Berikutnya dilakukan pengujian normalitas yang dilaksanakan guna melihat apakah pada pemodelan regresi, variabel pengganggu ataupun residual mempunyai penyebaran normal. Tujuan pengujian normalitas adalah guna mengetahui normal ataupun tidaknya data yang hendak dilakukan analisis. Pemodelan regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal ataupun hampir mencapai normal. Dalam rangka melaksanakan pengujian normalitas yang dipakai pada penelitian ini adalah melalui pengujian Kolmogorov Smirnov guna mengetahui normalitas distribusi residual. Apabila sig ataupun p-value > 0,05 berarti data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2013). Hasil pengujian statistik normalitas memakai 1 Sample-KS memperlihatkan nilai Asymp.sig, (2-tailed) > α (0,200 > 0,05). Jadi, bisa ditarik kesimpulan yakni lewat pengujian statistik terbukti data residual terdistribusi normal.

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan nilai sebagai berikut : variabel perencanaan (X1) 1,527, variabel pelaksanaan (X2) 1,322, variabel kompetensi SDM (X3) 2,053, variabel pengadaan barang dan jasa (X4) 1,724, dan variabel Regulasi (X5) 1,268. Nilai yang digunakan untuk memperlihatkan tidak terdapatnya multikolinieritas adalah nilai toleransi $\geq 0,1$ ataupun sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari tiap-tiap variabel ≤ 10 . Sehingga dari hasil uji dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menerapkan pengujian Glejser didapatkan nilai sig dari tiap-tiap variabel bebas lebih besar dari (>) tingkat kepercayaan (α) sejumlah 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Setelah menjalani pengujian asumsi klasik dengan hasil memenuhi, maka dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel perencanaan (X1), variabel pelaksanaan (X2), variabel kompetensi SDM (X3), variabel pengadaan barang dan jasa (X4) dan variabel regulasi (X5) terhadap penyerapan anggaran (Y). Hasil dari pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut :

Table 3 Uji Statistik T

Variabel	B	Kriteria
(Constant) -4,66	-0.466	.003
Perencanaan (X1)	.305	.003
Pelaksanaan (X2)	.143	.000
Kompetensi SDM (X3)	.207	.000
Pengadaan Barang dan Jasa (X4)	.224	.000
Regulasi (X5)	.282	.000

Sumber : data primer diolah peneliti

Berlandaskan tabel 3 bisa dirumuskan kedalam bentuk persamaan regresi yakni: $Y = -4,666 + 0,305_X1 + 0,143_X2 + 0,207_X3 + 0,224_X4 + 0,282_X5 + e$.

Persamaan analisis menunjukkan konstanta bernilai positif di seluruh variabel, artinya persamaan regresi berganda tersebut mempunyai hubungan searah, yang berarti penyerapan anggaran dapat naik sejalan variabel X yang nilainya naik. Nilai konstanta bernilai -4,466 (negatif), artinya bahwa jika penyerapan anggaran bernilai 0, maka nilai variabel X bernilai negatif.

Pembahasan

Pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran

Hasil uji pengaruh variabel perencanaan atas variabel penyerapan anggaran pada riset ini memperlihatkan nilai positif sejumlah 30,5%. serta nilai signifikan sejumlah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 bisa diambil kesimpulan yakni variabel perencanaan mempunyai pengaruh positif serta signifikan memengaruhi penyerapan anggaran. Temuan riset ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan Hasni & Basukianto (2016) menyebutkan bahwa faktor perencanaan memberikan pengaruh positif serta signifikan. Hal tersebut juga sejalan dengan riset Kirnanda (2016) yang menyebutkan bahwa variabel perencanaan mempunyai pengaruh positif serta signifikan memengaruhi penyerapan anggaran SKPD Kota Binjai. Hasil penelitian ini juga selaras dengan BPKP (2011) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran yang akurat dapat memudahkan pelaksanaan anggaran. Proses perencanaan adalah hal penting dalam pengelolaan anggaran. Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa anggaran berfungsi sebagai perumus tujuan dan sasaran kebijakan oleh pemerintah dengan jaban biaya yang diperlukan dan rencana sumber pendapatan yang dihasilkan pemerintah. Anggaran sebagai media perencanaan menjadi hal yang

pokok dalam mendukung tercapainya tujuan sektor publik, sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik dapat memaksimalkan penyerapan anggaran.

Pengaruh pelaksanaan terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi positif sejumlah 14,3 % serta nilai signifikan sejumlah 0,000 yang mana lebih kecil dari ($>$) $\alpha = 0,05$ bisa ditarik kesimpulan yakni variabel pelaksanaan mempunyai pengaruh positif serta signifikan memengaruhi penyerapan anggaran. Hal tersebut selaras dengan riset Gagola et al., (2017) yang menyebutkan bahwa faktor pelaksanaan memberikan pengaruh positif serta signifikan pada penyerapan anggaran. Riset Anisa (2017) juga mengemukakan bahwa pelaksanaan anggaran memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan perhitungan hasil tanggapan responden atas variabel administrasi rata-rata responden berpandangan bahwa pelaksanaan yang dijalankan belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut diketahui dari jawaban responden yang menyebutkan bahwa masa penyusunan maupun penelaahan anggaran yang terlampau singkat, pengajuan pencairan anggaran tidak sesuai jadwal, tidak terlaksananya kegiatan sekolah karena terdapat beberapa agenda kegiatan dari luar sekolah yang tidak terencana, terjadi perbedaan estimasi rincian biaya seperti kuantitas dan harga satuan pada anggaran dan realisasi. Berbagai masalah tersebut tentunya memberikan dampak pada realisasi program kegiatan di unit kerja responden. Anggaran pada fungsi pengawasan dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang berarti persetujuan pihak berwenang (utamanya dalam hal keuangan) dibutuhkan sebelum pekerjaan dilaksanakan Nafarin (2015:28). Hal ini berarti bahwa anggaran digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerja, anggaran yang disusun dengan baik dapat mengoptimalkan pelaksanaan kerja, sehingga penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan.

Pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi positif sejumlah 20,7% serta nilai signifikan sejumlah 0,000 yang mana lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ bisa ditarik kesimpulan yakni variabel SDM mempunyai pengaruh positif serta signifikan atas penyerapan anggaran. Temuan riset tersebut sejalan dengan riset Hasni & Basukianto (2016) yang menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif pada penyerapan anggaran, yang berarti makin tidak baik SDM yang tersedia, maka akan menunda penyerapan anggaran, sedangkan apabila SDM semakin baik tentunya akan memperlancar penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Penelitian Kirnanda (2016) juga menyebutkan bahwa sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan memengaruhi penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil tanggapan responden atas variabel SDM sebagian besar responden menyebutkan bahwa aparat pengelola pengadaan kurang kompeten di dalam mengurus program ataupun kegiatan, kurangnya koordinasi antara Kepala, Wakil Kepala, Bendahara, Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Responden juga menyebutkan bahwa adanya rangkap tugas dalam jabatan pejabat/tim pengadaan sebagai guru, karyawan, ataupun jabatan yang lain. Adanya keengganan untuk dipilah sebagai pejabat /tim pengadaan sebab tidak ada kesetimbangan risiko pekerjaan dengan upah yang diterimanya. Kepala, Wakil Kepala, Bendahara, Tim Pengadaan Barang dan Jasa sering mengalami mutasi.

Pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi positif sejumlah 22,4% serta nilai signifikan sejumlah 0,000 yang mana lebih kecil dari ($>$) $\alpha = 0,05$ bisa ditarik kesimpulan yakni variabel pengadaan barang serta jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan memengaruhi penyerapan anggaran. Temuan riset tersebut sejalan dengan Ramadhani et al., (2019) yang menyebutkan faktor barang dan jasa memberikan pengaruh positif pada penyerapan anggaran, makin baik proses pengadaan barang serta jasa berarti akan mempercepat penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, sedangkan apabila makin tidak baik proses pengadaan barang dan jasa, tentunya akan menunda penyerapan anggaran. Temuan riset Gagola et al., (2017) juga menyatakan bahwa pengadaan barang jasa memberikan pengaruh positif serta signifikan atas penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap variabel pengadaan barang serta jasa sebagian besar responden menyebutkan spesifikasi barang dan jasa yang tidak sesuai antara kebutuhan sekolah dengan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Sekolah juga merasa kesulitan menemukan rekanan yang memiliki harga sesuai anggaran saat melakukan pembelian menggunakan webstore sipah.

Pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi positif sejumlah 28,2% serta nilai signifikan sejumlah 0,000



yang mana lebih kecil dari ($>$) $\alpha = 0,05$ bisa ditarik kesimpulan yakni variabel regulasi mempunyai pengaruh positif serta signifikan memengaruhi penyerapan anggaran. Hal tersebut selaras dengan riset yang dilaksanakan oleh Alimuddin (2018) yang menyebutkan bahwa regulasi mempunyai pengaruh positif serta signifikan atas penyerapan anggaran. Berlandaskan hasil kuisioner, sebagian besar responden menyebutkan apabila sekolah menyusun anggaran dan merealisasikan anggaran menyesuaikan perubahan-perubahan terkini, termasuk perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat ataupun daerah. Selain itu sekolah merasa meskipun mengganggu program yang sudah direncanakan, perubahan anggaran akibat perubahan regulasi kadang perlu dilaksanakan dengan alasan keperluan instansi. Sekolah juga mengalami perbedaan biaya satuan antara harga pasar dengan standar harga yang ditentukan regulasi pemerintah.

SIMPULAN

Berlandaskan analisis data, uji hipotesis serta bahan riset, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, regulasi menunjukkan nilai positif dan signifikan. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, regulasi memengaruhi penyerapan anggaran dana BOS. Variabel perencanaan dan regulasi adalah variabel dominan dalam memengaruhi penyerapan anggaran dana BOS SMP Negeri Kota Yogyakarta.

Pengambilan sampel SMP Negeri di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dan penyerapan anggaran dana BOS sebagai variabel penelitian merupakan temuan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Harapannya melalui penelitian ini DINDIKPORA Kota Yogyakarta dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dana BOS SMP Negeri dengan menaikkan mutu perencanaan penyusunan anggaran, menaikkan mutu SDM, penempatan SDM yang mahir berdasarkan tingkat pendidikan serta kemampuan, mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa, dan menyesuaikan dengan regulasi. Dengan demikian penyerapan anggaran BOS pada SMP Negeri di Kota Yogyakarta terus meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alimuddin. (2018). *Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 2(1), 84–101.
- BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. *Majalah Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta, tahun III(6)*.
- Gagola, L. S., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Taulud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Hasni, N. T., & Basukianto. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. *Telaah Manajemen*, 13(1), 33–34.
- Herlambang, S. (2013). *Pengantar Manajemen (cara mudah memahami manajemen)*. Gosyen Publishing.
- Jumriani. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 11–18.
- Kirnanda, A. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai Dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Sumatera Utara.
- Mutmainna, & Iqbal, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *ASSETS*, 7(1), 120–132.
- Nafarin, M. (2015). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat.
- Nugroho, R., & S. Alfarisi. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 10(1), 22–37.
- Nuri, L. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Sumatera Utara.



- Okfaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau*. 1(2).
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Rai, A. I. G. (2010). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Grafindo.
- Ramadhani, R., Setiawan, M. A., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Jurusan,). (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/6>
- Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara.
- Rozai, M. A., & Subagiyo, L. (2015). Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia*, 9(1), 72–89.
- Salamah, S. (2018). Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 45–52.
- Sasongko, & Parulian. (2015). *Anggaran*. Salemba Empat.
- Solihin, I. (2013). *Manajemen Strategik*. Erlangga.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja di Akhir Tahun. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, 129–138.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Press.
- Syakhrial. (2017). Analisis Pengaruh Proses Perencanaan Anggaran, Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dan Verifikasi Dokumen Pembayaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus : Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2), 187–203.
- Trisna, Marto, H., & Sari, S. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran di Wilayah Pembayaran KPPN Tolitoli Tahun Anggaran 2019. *Tolis Ilmiah Jurnal Penelitian*, 2(2), 149–162.
- Widianingrum, D., Kustono, A. S., & Suryaningsih, I. B. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Situbondo. *BISMA*, 11(2), 194. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6314>
- Yanurizza. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau. *Jurnal Ekonomi - JE*, 27(4), 409–423.
- Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Pada Triwulan IV Di Kota Cimahi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1221–1234.